



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH (PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN) TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM
KONTEKS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

OLEH

**RAMADHANERA PUTERI MADYA
04151036**

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi

***Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi***

**PADANG
2009**



No. Alumni Universitas

**RAMADHANERA PUTERI
MADYA**

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/tanggal lahir : Painan / 12 Mei 1987 b) Nama Orang Tua : Drs.Armansyah Madya dan Siti Abidah c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 04151036 f) Tanggal Lulus : 05 Maret 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,32 i) Lama Studi : 4 tahun 6 bulan h) Alamat Orang Tua : Jl. Cindur Mato, Rawang. Painan Utara. Painan, Pesisir Selatan.

*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) Terhadap Pembangunan Manusia
Dalam Konteks Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*

Skripsi S1 oleh Ramadhanera Puteri Madya Pembimbing Fajri Muharja, SE, M.Si

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan serta kesehatan terhadap pencapaian nilai IPM dalam konteks antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan adalah proporsi atau persentase pengeluaran pembangunan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap total pengeluaran pembangunan. Proporsi tersebut menggambarkan sejauh mana perhatian ataupun keseriusan pemerintah daerah yang bersangkutan terhadap proses pembangunan manusia. Data pada penelitian ini di diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dimana untuk data IPM dipublikasikan 3 tahun sekali dan yang terbaru adalah data IPM tahun 2006. Setelah melakukan pengolahan dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) terhadap data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan serta kesehatan tahun 2005 dan data IPM tahun 2006, diperoleh suatu penemuan empiris bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan serta kesehatan tidak signifikan mempengaruhi tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diwakili oleh IPM. Dengan demikian hipotesa awal yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah di kedua bidang tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap nilai IPM bila dipandang dalam konteks antar kabupaten/kota tidak dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang melakukan pengeluaran atau belanja yang besar di bidang pendidikan dan kesehatan belum tentu mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 05 Maret 2009
Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Fajri Muharja, SE, M.Si	Dra. Syukriati Syukur, M.Si	Yulia Anas, SE, M.Si

Mengetahui,
Ketua Jurusan Prof. Dr. Firwan Tan, SE, M. Ec, DEA. Ing

NIP : 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas produksi yang terdapat dalam masyarakat. Keempat faktor dinamika itu harus dilihat dalam kaitan interaksinya satu dengan yang lain. Namun, diantaranya peranan sumber daya manusia mengambil tempat yang sentral, khususnya dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat (Djojohadikusumo, 1994).

Setelah tahun 1960-an, banyak lahir pemikiran tentang upaya-upaya pembangunan sumber daya manusia. Banyaknya minat para ilmuwan waktu itu berkaitan erat bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi pembangunan. Bukan hanya secara ekonomis, tetapi secara politis pun pembangunan sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu strategi untuk mengatasi persoalan pembangunan yang dipersiapkan lebih '*acceptable*', daripada strategi pengembangan sumber-sumber produksi lainnya seperti pengadaan modal fisik serta adaptasi teknologi canggih (Elfindri, 2001).

Yang lebih menarik adalah pembangunan sumber daya manusia memiliki berbagai keuntungan, yang paling menguntungkan adalah besarnya nilai externalities yang dihasilkan. Externalities yang dimaksudkan disini adalah bahwa keuntungan-keuntungan dalam perbaikan mutu manusia tidak hanya dapat

dirasakan oleh individu yang bersangkutan tetapi juga oleh rumah tangga, komunitas ataupun masyarakat secara makro. Oleh karena itu, investasi untuk peningkatan mutu manusia mulai mendapat perhatian oleh pemerintah, terutama di negara-negara berkembang (Elfindri, 2001).

Kualitas penduduk turut memegang peranan dalam pembangunan suatu negara yang dapat dirobah/ditingkatkan statusnya sehingga lebih menguntungkan kegiatan-kegiatan pembangunan. Secara implisit diisyaratkan dalam GBHN Republik Indonesia bahwa jumlah penduduk yang besar tanpa kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan. Karenanya, kualitas penduduk adalah merupakan salah satu masalah pokok di bidang kependudukan disamping jumlahnya yang besar, sebaran yang tidak merata dan struktur umur yang kurang seimbang. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah memberikan perhatian yang lebih besar dalam upaya dan usaha peningkatan kualitas penduduk Indonesia terutama semenjak Repelita IV disamping terus mengendalikan kuantitas penduduk (Lains, 1987).

Persoalan pentingnya investasi sektor publik untuk pembangunan manusia berlaku juga untuk pemerintah daerah, terlebih setelah diterapkannya desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No. 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah". UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah propinsi sebagai koodinator. Undang-undang ini memberikan otonomi kepada daerah kabupaten/kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat (Landiyanto, 2005). Dengan arti kata bahwa pemerintah pusat

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia yang digambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat sempat mengalami penurunan dari kondisi tahun 1996 pada tahun 1999 karena dampak dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Dan kemudian mulai mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, namun masih berkisar pada angka 60 sampai 70-an (belum ada kabupaten atau kota yang dapat menembus angka IPM 80).
2. Sementara untuk proporsi pengeluaran pembangunan pemerintah baik untuk sektor pendidikan maupun kesehatan mengalami fluktuasi di tiap-tiap daerah di Sumatera Barat. Masih banyak kabupaten/kota yang mengalokasikan pengeluaran pembangunan untuk kedua sektor ini dibawah angka 20 %, yang menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kedua sektor tersebut yang notabene adalah unsur penunjang pembangunan manusia. Namun semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mulai memberikan perhatian dan porsi lebih terhadap kedua sektor tersebut, namun sektor kesehatan masih berada di bawah sektor pendidikan dalam hal pengeluaran pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram M dan Khan F J. 2007. Public Provision of Education and Government Spending in Pakistan. www.pide.org.pk.
- Badan Pusat Statistik. 2006. Analisa Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat Tahun 2005. Padang: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.
- , 2007a. Laporan Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan 2006. www.google.com.
- , 2007b. Analisa Indeks Pembangunan Manusia Toba Samosir Tahun 2006. [http// www. Sumut.bps.go.id](http://www.Sumut.bps.go.id).
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia dan Kemiskinan. www.google.com.
- Brata, A. G dan Z. Arifin. 2003. Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia. [www google.com](http://www.google.com).
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi; Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Dowrick S, Dunlop Y dan Quiggin J. 2002. Social Indicators and Comparisons of Living Standards. *Journal of Development Economics*.
- Elfindri. 2001. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Padang: Penerbit Universitas Andalas.
- , 2003. Ekonomi Layanan Kesehatan. Padang: Penerbit Universitas Andalas.